

PENDIDIKAN ISLAM:
Memayu Hayuning Bawono

Moh. In'ami
Staf Pengajar STAI Al-Muhammad Cepu
E-mail: abushofiya46@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan islam merupakan suatu proses dalam menemukan transformasi baik dalam diri maupun komunitas. Pendidikan Islam sendiri berupaya membimbing dan mengarahkan pertumbuhan serta perkembangan diri dan kelompok menuju perbaikan mental yang akan terwujud dalam perbuatan dan membebaskan manusia dari berbagai ikatan, intimidasi, dan eksploitasi.

Pendidikan Islam di Indonesia dalam upaya membebaskan diri dari segala bentuk ikatan, intimidasi dan eksploitasi peradaban baru selalu menghadapi berbagai tantangan-tantangan serius yang memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah dan kalangan yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk menjaga eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Karena bagaimanapun pendidikan Islam merupakan warisan sejarah yang harus di jaga kelestariannya.

Pesantren dan madrasah sebagai bentuk lembaga pendidikan islam di indonesia dewasa ini dihadapkan pada beberapa bentuk konformisme kurikulum dan sumberdaya manusia, dampak perubahan sosial politik, perubahan orientasi pendidikan, dan globalisasi. Untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dalam mengikis segala bentuk kelemahan pendidikan Islam serta mewujudkan pembaharuan sistem dengan jalan menjadikan pendidikan Islam sebagai faktor penting dalam upaya mewujudkan manusia seutuhnya di kalangan mayoritas.

Kata kunci: *rihlah ilmiah, halaqah, tarbiyah, ta'lim, ta'dib*

Pendahuluan

Pendidikan Islam mempunyai sejarah panjang. Dalam pengertian seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Dalam konteks masyarakat Arab, di mana Islam lahir dan pertama kali berkembang, kedatangan Islam lengkap dengan usaha-usaha pendidikan –untuk tidak menyebut sistem– merupakan transformasi besar. Sebab, masyarakat Arab pra-Islam pada dasarnya tidak mempunyai sistem pendidikan formal. (Azyumardi Azra, 2000:vii)

Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan formal yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat dikaitkan dikatakan umumnya bersifat informal; dan inipun lebih berkaitan dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah –penyebaran, dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. dalam kaitan itulah bisa dipahami kenapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah sahabat tertentu, yang paling terkenal aalah Dar al-Arqam. Tetapi ketika masyarakat Islam sudah terbentuk, maka pendidikan diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam *halaqah*, lingkaran belajar.

Pendidikan –kata ini juga dilekatkan kepada Islam– telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh berbagai kalangan, yang banyak dipengaruhi pandangan dunia (*weltanschauung*) masing-masing. Namun, pada dasarnya, semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam semacam kesimpulan awal, bahwa pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien.

Pendidikan lebih daripada sekedar pengajaran; yang terakhir ini dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Dengan demikian, pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan “tukang-tukang” atau para spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisasinya yang sempit, karena itu, perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis.

Jika sistem pendidikan Barat sekarang ini sering disebut-sebut mengalami krisis yang akut, itu tak lain karena proses yang terjadi dalam pendidikan tak lain daripada sekedar pengajaran. Pendidikan yang berlangsung dalam suatu *schooling system* tak lebih dari suatu proses transfer ilmu dan keahlian dalam kerangka tekno-struktur yang ada.

Akibatnya, pendidikan –sebut saja pengajaran– menjadi suatu komoditi belaka dengan berbagai implikasinya terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Kritik tentang sistem pendidikan modern lihat *Deschooling Society*. Menurut Illich ringkasnya, kelembagaan sekolah tidak akan membawa perubahan apa-apa. Sistem sekolah yang ada hanya memperkuat struktur kelas atas yang telah mapan. Karena itu semua sistem kelembagaan harus dihapuskan untuk diganti dengan “jaringan belajar” (*learning webs*). Gagasan senada juga dikemukakan Everett Reimer dalam “School is Dead”, dengan menyatakan, bahwa bagi kebanyakan orang merupakan institusi pendukung privelese, dan bahkan pada waktu yang sama merupakan instrumen utama bagi mobilitas vertikal masyarakat sehingga menciptakan kelas-kelas baru yang teralienasi dari masyarakatnya. Selanjutnya tentang *deschooling society*-nya Illich dapat dibaca dalam *After Deschooling What?* (Illich, 1973).

Perbedaan pendidikan dengan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik di samping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong kehidupan. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional Indonesia menyatakan, bahwa pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. (Dewantara, 1967: 42).

Pengertian pendidikan secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan Islam –sebagai suatu sistem keagamaan– menimbulkan pengertian-pengertian baru, yang secara implisit menjelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dalam konotasi istilah “*tarbiyah*”, “*ta’lim*” dan “*ta’dib*” yang harus dipahami secara bersama-sama. (Alattas, 1997) Ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam; “informal”, “formal” dan “nonformal”. (Nichoff, 1976)

Sementara itu, pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan peradaban Islam dan sekaligus aset bagi pembangunan pendidikan

nasional. Sebagai warisan, ia merupakan amanat sejarah untuk dipelihara dan dikembangkan oleh umat Islam dari masa ke masa. Sedangkan sebagai aset, pendidikan Islam yang tersebar di berbagai wilayah ini membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menata dan mengelolanya, sesuai dengan sistem pendidikan nasional. dalam kedua perspektif di atas, pendidikan Islam di Indonesia selalu menjadi lahan pengabdian kaum Muslimin dan sekaligus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Mendiskusikan masalah pendidikan Islam di Indonesia secara garis besar terbagi ke dalam dua tingkatan: makro dan mikro. Pada level yang pertama, pendidikan Islam bersentuhan dengan sistem pendidikan nasional dan faktor-faktor eksternal lain. Sedangkan pada level kedua, pendidikan Islam dihadapkan pada tuntutan akan proses pendidikan yang efektif sehingga menghasilkan out put yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Berbagai persoalan dari kedua level di atas pada prinsipnya mendorong adanya perubahan arah pendidikan Islam mengingat tantangan kontemporer dan tantangan masa depan.

Yang dimaksud dengan terma 'pendidikan Islam' dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pendidikan menurut Islam atau Pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hal ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.
2. Pendidikan ke-Islam-an atau Pendidikan Agama Islam, yaitu upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* seseorang.
3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Dalam arti proses pertumbuhan Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran maupun sistem budaya dan peradaban, sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. (Muhaimin, 2002: 29)

Menurut Husni Rahim, posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional dapat diidentifikasi ke dalam pengertian berikut: (i) pendidikan Islam adalah lembaga-lembaga pendidikan keagamaan

seperti pesantren, pengajian, dan madrasah diniyyah, (ii) pendidikan Islam adalah muatan atau materi pendidikan agama Islam dalam kurikulum pendidikan nasional, (iii) pendidikan Islam merupakan ciri khas dari lembaga pendidikan sekolah yang diselenggarakan oleh departemen agama dalam bentuk madrasah, dan oleh oraganisasi serta yayasan keagamaan Islam dalam bentuk sekolah-sekolah Islam. (Rahim, 2001: 11)

Memahami hal-hal tersebut di atas setidaknya dapat menghindarkan diri dari kerancuan pemahaman terhadap pendidikan Islam. Namun permasalahan yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia?

Eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan proses penyebaran Islam, meskipun masih bersifat individual. Berawal dari para juru dakwah yang mendekati masyarakat secara persuasif dan memberikan dasar-dasar agama Islam, dengan memanfaatkan masjid atau surau, secara bertahap berlangsung pengajian umum mengenai tulis baca al-Qur'an dan wawasan keagamaan. Namun demikian, pelembagaan khusus untuk pelaksanaan pendidikan bagi umat Islam di Indonesia baru terjadi dengan pendirian pesantren yang muncul kira-kira pada abad 13. (Rahim, 2001: 6)

Terdapat peningkatan pada diri umat Islam dalam mempelajari agamanya, bahkan nampak sebagian out put pesantren melanjutkan studinya ke pusat kajian Islam di Timur Tengah. *Rihlah ilmiah* tersebut menambah wawasan keilmuan, pengalaman dan inspirasi dari gerakan modernisasi pendidikan di Timur Tengah. Mereka kemudian memprakarsai pendirian madrasah-madrasah di Indonesia.

Di samping itu, kaum Muslim di Indonesia juga berinteraksi dengan sistem pendidikan sekolah yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka mendirikan sekolah-sekolah ala Belanda yang dikenal sekuler dengan menambahkan muatan agama. Mengenai pendirian madrasah dan sekolah-sekolah Islam lebih detail, lihat *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*. (Steenbrink, 1986)

Pendidikan dikhotomis terjadi di Indonesia yang berdampak pada banyak sekolah Islam yang mendapat pengakuan dan subsidi dari pemerintah, karena menggunakan sistem dan kurikulum yang hampir

sama dengan sekolah-sekolah pemerintah. Sementara lembaga pendidikan, seperti pesantren, pada umumnya tetap menjaga jarak (non kooperatif) dengan sistem persekolahan.

Pada saat awal kemerdekaan, Indonesia mengembangkan lembaga pendidikan sekolah sebagai *mainstream* sistem pendidikan nasional. secara pragmatis, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan pendidikan yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, pergumulan antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Islam terus berlangsung. Sebagai bagian dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang lebih utuh, pergumulan itu secara bertahap menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang cukup signifikan. Perkembangan ini tercermin dalam Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Titik penyesuaian terletak pada cakupan sistem pendidikan yang komprehensif, tidak terbatas pada jalur persekolahan, tetapi juga lembaga pendidikan keagamaan. Adanya penempatan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan satuan pendidikan. Hal ini memberi jaminan adanya komitmen keagamaan dalam sistem pendidikan nasional sehingga tidak sepenuhnya bersifat sekuler.

Dengan diakuinya lembaga pendidikan madrasah dalam jalur pendidikan sekolah telah menghapus kesenjangan antara lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan madrasah.

Memang pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan memiliki latar belakang sosio-historis yang sama, maka persoalan yang muncul dan upaya-upaya pemecahannya akan menuju ke arah yang sering kali sama dan serasi. (Sindhunata, 200: 220) Perbedaan yang mungkin ada antara tujuan pendidikan yang substansial, dan lebih diwarnai oleh perbedaan kepentingan antar kelompok sosial yang memegang kendali pengelolanya. Contoh yang paling menonjol adalah pandangan epistemologis sejumlah sejumlah pengamat pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan pesantren menekankan pembangunan moral dan akhlak peserta didik dengan melupakan aspek pencerdasan, sedangkan pendidikan di sekolah-sekolah modern menekankan pengembangan intelektual dengan mengabaikan pembinaan moral.

Realitas Pendidikan Islam Kini

Praktek pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. Namun demikian, dalam perkembangan terakhir, kenyataannya menunjukkan kemajuan, setidaknya-tidaknya jika dilihat dari indikator kuantitatif. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum misalnya berlangsung minimal 2 jam pelajaran per minggu. Banyak sekolah bahkan menambah pelajaran pendidikan agama Islam bagi peserta didiknya, baik melalui penambahan jam pelajaran di kelas, maupun melalui kegiatan ekstra-kurikuler. Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah juga disemarakan oleh paket-paket pengajaran khusus, seperti paket pesantren kilat.

Akan tetapi belakangan banyak keluhan muncul berkaitan dengan perilaku remaja sekolah yang kurang terpuji, seperti tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, dan pergaulan bebas. Terhadap problema ini, berbagai kalangan mempersalahkan terbatasnya jumlah jam pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Sementara sebagian lain melihat faktor langkanya mata pelajaran budi pekerti dalam kurikulum sekolah.

Hingga saat ini kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih terdapat kelemahan; *Pertama*, kelemahan sumber daya manusia (SDM), manajemen maupun dana. Jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang makin kompetitif seperti sekarang ini harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen dan dana. (Nata, 2001: 178)

Kedua, hingga kini lembaga pendidikan Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal dalam mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Sementara masyarakat masih memposisikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya, yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam. Lembaga pendidikan Islam masih belum mampu mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam secara kontekstual dengan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Ketiga, masih belum terwujud Islam secara transformatif. Bahwa masyarakat Muslim dalam kehidupan beragama hanya berhenti pada dataran simbol dan formalistik.

Keempat, hingga saat ini posisi lembaga pendidikan Islam masih kurang diminati masyarakat, pada umumnya mereka lebih memilih sekolah pada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan label Islam seperti MI, MTs, MA, pesantren dan sebagainya. Kenyataan yang demikian ini harus diubah dengan jalan mengimbangi kemajuan yang dicapai lembaga pendidikan umum.

Pendidikan secara kultural pada umumnya berada dalam lingkup peran, fungsi dan tujuan yang tidak berbeda. Semuanya hidup dalam upaya yang bermaksud mengangkat dan menegakkan martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya, terutama dalam bentuk *transfer of knowledge* dan *transfer of values*.

Dalam konteks ini secara jelas menjadi sasaran jangkauan pendidikan Islam, karena bagaimanapun pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sekalipun dalam kehidupan bangsa Indonesia tampak sekali terbedakan eksistensinya secara struktural, sosiologis bangsa, walaupun tetap saja tidak mampu menyamai pendidikan umum yang ada dengan otonomi dan dukungan yang lebih luas, dalam mewujudkan pendidikan secara nyata.

Sebagai pendidikan yang berlabel agama, maka pendidikan Islam memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pengajarannya dibanding dengan pendidikan umum, sekalipun lembaga pendidikan ini juga memiliki muatan serupa. Kejelasannya terletak pada keinginan pendidikan Islam untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara berimbang, baik aspek pengetahuan, imajinasi dan keilmuan, kultural serta kepribadian. Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam mengantarkan anak didik untuk memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional maupun spiritual. Karena itulah pendidikan Islam memiliki beban yang berat, sebab berusaha memadukan unsur profan dan imanen, di mana dengan pepaduan ini akan membuka kemungkinan terwujudnya tujuan inti pendidikan Islam, yaitu melahirkan manusia-manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, yang satu dengan yang lain saling menunjang. Antara ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan, karena perkembangan masyarakat Islam serta tuntutananya dalam membangun manusia seutuhnya sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan yang diicerna melalui proses pendidikan. (Marimba, 1986: 47-49).

Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pendidikan Islam

Membaca sejarah ketika berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada departemen agama dan departemen pendidikan dan kebudayaan (sekarang Diknas). Oleh karena itu dikeluarkan peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (baik negeri maupun swasta), sementara pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama sendiri.

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. (Zuhairini, 1997: 154)

Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan di Indonesia belum mantap sehingga SKB dua menteri di atas belum dapat berjalan dengan semestinya. Daerah-daerah diluar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR. Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1974, yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama yang bertugas mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.

Pada tahun 1950 di masa kedaulatan Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia, makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada masa sekarang ini di lembaga pendidikan baik yang umum maupun yang agama, yang sedang berlangsung adalah pengajaran agama dan bukan pendidikan agama. Pengajaran agama di sini maksudnya pengajaran tentang pengetahuan keagamaan kepada anak didik, seperti pengetahuan tauhid, pengetahuan tentang fiqh, tafsir, hadits dan

sebagainya. Dengan demikian apa yang disebut dengan pendidikan agama dalam sistem pendidikan di lembaga pendidikan kita bukan bertujuan menghasilkan anak didik yang berjiwa agama, tetapi anak didik yang berpengetahuan agama. Berbeda antara orang yang berpengetahuan agama dan orang yang berjiwa agama. Di sini nampak salah satu sebab timbulnya kemerosotan akhlaq yang kita jumpai sekarang di masyarakat. (Nasution, 1998: 385)

Membangun Manusia Seutuhnya melalui Revitalisasi Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah dalam berbagai aspeknya. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Sedangkan pembangunan aspek moral, hanya dalam porsi yang kecil saja menjadi tanggung jawab pendidikan Islam. (Usa, 1991: 11)

Dalam suatu komunitas masyarakat Muslim, pendidikan Islam tidak diberi kesempatan luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini. Perhatian pemerintah yang dicurahkan sangatlah kecil porsinya, padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang sosialis-religius. Dan bahkan tidak salah jika dikatakan, bahwa pendidikan Islam di Indonesia justru menempati 'kelas dua' dalam masyarakat yang mayoritas Muslim.

Ironisnya lagi, pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dianggap gagal dan tidak mampu membentengi anak didik dan masyarakat luas dari keruntuhan moral yang kini mengakibatkan krisis ekonomi dan politik berkepanjangan. Hal inilah yang mendorong bagi diperlukannya revitalisasi PAI dalam rangka membangun manusia seutuhnya demi tercapainya masyarakat yang adil dan beradab. Ketika segala degradasi nilai dan moral yang menimpa seluruh bangsa dewasa ini menjadi tanggung jawab PAI cukup berlebihan, meski PAI berperan penting dalam pembinaan dan pengembangan moralitas bangsa, namun sesungguhnya PAI itu merupakan salah satu komponen dari keseluruhan aspek pendidikan.

Kenyataan di atas, disebabkan oleh berbagai kelemahan yang melanda dunia pendidikan Islam. Kesempatan untuk memperoleh legitimasi yang lebih luas dan perbaikan secara mendasar, hampir tidak pernah diperolehnya. Ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam

upaya mempertahankan eksistensinya, karena jika posisinya hanya mampu bertahan, maka berarti sebuah kemunduran, karena era kemajuan telah terpacu dengan hebat sesuai dengan arus perubahan sosial dan pendidikan Islam sendiri selalu ketinggalan zaman. Kondisi ini menjadikan pendidikan Islam sebagai sebuah lembaga yang tidak adaptif atau bahkan konservatif dan berada pada status quo.

Upaya pembaharuan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihambat oleh berbagai masalah mulai persoalan dana sampai tenaga profesional. Padahal pendidikan Islam dewasa ini, dari segi apa saja terlihat goyah terutama karena orientasi yang semakin tidak jelas. (Usa, 1991: 13)

Bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan pusat konsentrasi penganut Islam terbesar di dunia, pasti membutuhkan lembaga pendidikan Islam yang benar-benar *qualified* yang diperuntukkan bagi kepentingan bangsa secara keseluruhan, agar wawasan ke-Islam-an selalu berkait dengan wawasan ke-Indonesia-an. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam di negara ini, seharusnya tidak hanya sebagai wadah penyaluran 'hobby', artinya benar-benar dapat diharapkan sebagai perakit masa depan bangsa.

Dalam membangun manusia seutuhnya, sasaran yang harus dicapai adalah menjadikan pendidikan agama Islam sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain keberadaan pendidikan Islam, tanpa mengurangi fleksibilitas dan perhatian, harus memiliki ketegasan dalam visinya sehingga tidak tergoda oleh tarikan-tarikan ekstrim, tetapi mampu mengelola berbagai kecenderungan yang tersedia secara responsif. Visi tersebut ditempatkan sebagai pemandu yang menjamin konsistensi pendidikan Islam dalam konteks perubahan dan dinamika yang terjadi dalam dirinya secara terus menerus. Kerangka visi pendidikan Islam itu harus dibangun dengan mempertimbangkan sumber nilai/ajaran Islam, karakter essensial dari sejarah pendidikan Islam dan rumusan tantangan masa depan.

Penutup

Pendidikan merupakan sebuah proses dan sekaligus sistem yang bermuara dan berujung pada pencapaian suatu kualitas manusia tertentu yang dianggap dan diyakini sebagai yang ideal.

Konsepsi pendidikan Islam yang menekankan dimensi dialektikal horizontal dan dimensi ketundukan vertikal, sangat penting dalam membantu memecahkan problem pencapaian kemanusiaan manusia yang dalam kehidupan modern saat ini justru semakin jauh dari kenyataan. Dengan revitalisasi pendidikan agama Islam dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai pendidikan Islam yang *memayu hayuning bawana*.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih terkesan setengah-setengah dan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari kecilnya peluang yang diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk maju dan berkembang. Problema klasik yang masih nampak adalah pendidikan yang dikhotomis, yang membedakan urgensi pendidikan agama dan pendidikan umum.

Solusi atas permasalahan di atas -yang ditawarkan- adalah mempersiapkan sumber daya manusia, mewujudkan perilaku Islami di kalangan umat Muslim, membangun wacana Islam secara transformatif, dan membentuk lembaga pendidikan Islam yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Terlebih jika mampu membangun sebuah lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam tanpa terjebak dalam dikotomik pendidikan, sehingga dapat diakses oleh berbagai masyarakat secara luas.

Sementara itu pemerintah, dalam kaitannya dengan lembaga pendidikan Islam, hanya sebagai pendukung dan memberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengembangkan dan memajukan dalam berbagai aspek, baik intelektual, emosional maupun spiritual.

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia yang ada saat ini masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, meski demikian tidak menuntut kemungkinan untuk diadakan perbaikan dan improvisasi dalam segala hal, demi mencapai realitas pendidikan yang benar-benar mampu mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi manusia seutuhnya (*insan kamil*).

Daftar Pustaka

- Nata, Abudin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gramedia Widayarsana Indonesia, 2001)
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000)
- Marimba, Bron AD., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1986)
- Case, Harry R. dan Nichoff, Richard O., *Educational Alternatives in National Development*, (Michigan: Michigan University Press, 1976)
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Rahim, Husni, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- Illich, Ivan, et.al., *After Deschooling What?*, (New York: Perennial Library, 1973)
- _____, *Deschooling Society*, (New York: Penguin Book, 1979)
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah dan Sekolah*, (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Dewantara, Ki Hajar, *Masalah Kebudayaan; Kenang-Kenangan Promosi Doktor Honoris Causa*, (Yogyakarta, 1967)
- Muhaimin, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Usa, Muslih (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991)
- Alattas, Sayyed Naquib, *Aims an Objectives of Islamic Education*, (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1977)
- Kuntoro, Shodiq A., *Pendidikan Islam dan Tantangan Zaman*, dalam MPA edisi 186, Maret 2002
- Sindhunata (ed.), *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)